

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT OF JAKARTA DC IN HANDLING SOCIAL WELFARE PROBLEMS – STREET CHILDREN

D. Farida Sinaga

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Raya Jatinangor Km.20, Jatinagor, Sumedang
faridasinaga_ipdn@yahoo.co.id*

Abstract

Social welfare problems which is noted as Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) in Indonesia, is urgently needed to be solved. Jakarta Dean Capital (Jakarta DC) as promising city to every Indonesian citizens is the most troubled with PMKS. Hence local government is accused to handle PMKS problem by issuing various programs. The objective of the study therefore is to evaluate the role of local government in handling PMKS problem. Research design is constructed as field research method in three (3) locations PSAA. Study showed that local government should involve the relevant agencies such as Social Services, Satpol PP, Public Health Service and the Police in handling PMKS problems. Outreach result is suggested to be handed over to Social Institutions “Bina Insan Bangun Daya” for temporary shelter in order to classify type of PMKS. PMKS-Street Children types are referred to the Social Institutions “Anak Putra Utama.”

Key Words : Jakarta DC, PMKS, local government, street children

PERANAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)-ANAK JALANAN

Abstrak

Masalah kesejahteraan sosial yang dikenal sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia, sangat diperlukan untuk dipecahkan. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai kota yang menjanjikan untuk setiap warga negara Indonesia adalah yang paling bermasalah dengan PMKS. Oleh karena itu pemerintah setempat dituntut untuk menangani masalah PMKS dengan mengeluarkan berbagai program. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam menangani masalah PMKS. Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan di tiga (3) lokasi PSAA. Studi menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus melibatkan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Kepolisian dalam menangani masalah PMKS. Hasil penjangkauan/penerbitan disarankan untuk diserahkan kepada Panti Asuhan “Bina Insan Bangun Daya” untuk tempat tinggal sementara sambil mengklasifikasikan jenis PMKS. PMKS-Anak Jalanan selanjutnya diserahkan ke Panti Asuhan “Anak Putra Utama.”

Kata Kunci : ibu kota Jakarta, PMKS, pemerintah daerah, anak jalanan